



.....
**DESTINASI PARIWISATA KEBUGARAN: MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERBASIS MASYARAKAT**

Oleh

**Wardiyanta¹, Ifada Rahmayanti², Palupi Melati Pangastuti³, Fitroh Adhila⁴, M. Syamsu
Hidayat⁵**

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahamd Dahlan

⁵Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahamd Dahlan

Email: ¹wardiyanta@culiary.uad.ac.id

Abstrak

Pariwisata berbasis masyarakat (CBT) adalah tentang pemberdayaan, pemerataan manfaat, keadilan sosial, tindakan redistributif, dan kepemilikan sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata memiliki beberapa tahapan yang disebut Tourist Area Life Cycle (TALC) / siklus perkembangan pariwisata, yakni: eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, peremajaan, dan penurunan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara tahapan siklus pengembangan pariwisata dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata kebugaran. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami pengalaman individu dalam pengembangan destinasi pariwisata kebugaran berbasis masyarakat di Kalurahan Canden Jetis Bantul. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 20 informan yang terdiri dari pejabat kalurahan canden dan pengusaha makanan, pengusaha jamu, pengelola dan tokoh masyarakat Canden, serta diskusi kelompok yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Canden, akademisi, dan jurnalis. Selain itu juga digunakan berbagai dokumen kebijakan pemerintah. Analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan stake holder yang lain tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan hubungannya dengan CBT perlu lebih ditingkatkan supaya pengembangan destinasi pariwisata kebugaran lebih bersifat partisipatif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata kebugaran di Canden berada dalam tahap penyiapan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengendalian destinasi wisata.

**Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat; CBT; Partisipasi Masyarakat; Siklus
Perkembangan Pariwisata**

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis masyarakat (CBT) dapat menjadi sarana yang strategis untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan masyarakat local. Pariwisata merupakan elemen penting dari diversifikasi ekonomi baik bagi negara berkembang maupun negara maju dan di negara berkembang merupakan sektor ekspor utama (UNWTO, 2017). CBT dipahami sebagai bentuk pariwisata yang muncul untuk mengimbangi dampak negatif pariwisata

konvensional atau massal (Gadi Djou, Baiquni, Widodo, & Fandeli, 2017) seperti kebocoran dan tidak adanya kendali masyarakat setempat atas sumber daya alam. Selain mendatangkan manfaat, pariwisata juga menghadirkan tantangan, masalah, dan dampak negatif, seperti penggunaan air yang sangat besar dan dampak negatif terhadap masyarakat (Mtapuri & Giampiccoli, 2017). Banyak akademisi berpendapat bahwa pariwisata juga dapat melanggengkan kesenjangan kelas dan regional serta



merangsang masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang telah menimbulkan keraguan besar tentang pariwisata sebagai strategi pembangunan yang dapat diandalkan di negara-negara yang belum berkembang” (Tosun, Timothy, & Öztürk, 2003). Namun CBT bukanlah jawaban untuk pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pariwisata (Mitchell dan Muckosy, 2008). Meskipun CBT menjanjikan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi yang sempurna dan siap pakai untuk masalah masyarakat (Suansri, 2003). CBT bukanlah obat mujarab, yang akan dengan cepat menyelamatkan masyarakat dari semua masalah yang mereka hadapi. Jika diterapkan secara sembarangan, CBT dapat menimbulkan masalah dan bahkan membawa bencana bagi masyarakat”. Para peneliti selanjutnya mengusulkan perlunya menempatkan pariwisata sebagai arus utama untuk memperkuat hubungan antara pariwisata dan masyarakat local, karena seringkali penduduk asli yang berlokasi di daerah tertinggal dan memiliki mata pencaharian yang rentan berada dipihak yang tidak diuntungkan. Masalah yang seringkali muncul dan dominan, terutama di negara berkembang adalah masalah pemasaran pariwisata dan akses pasar, tantangan utamanya adalah kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan berbasis lokal pada saat akan memasarkan diri mereka, di mana Pasar sasarannya adalah pasar yang dapat dengan mudah ditutup oleh yang lebih besar (Timothy, 2002).

Saayman & Giampiccoli (2016) menyatakan bahwa tantangan lain yang umumnya dihadapi dalam pengembangan CBT diantaranya adalah: terbatasnya kapasitas lokal, lemahnya pemasaran, dan kelangsungan ekonomi. Salah satu cara untuk menyelesaikan kelemahan tersebut adalah terkait dengan metode dan teknik implementasinya. Pendapat lain dikemukakan oleh Moscardo (2008) yang menyatakan

bahwa di saat pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata secara keseluruhan belum seefektif atau berkelanjutan seperti yang dijanjikan, keduanya masih sebatas potensi besar bagi banyak daerah. Meskipun hanya ada sedikit bukti bahwa CBT memberikan kontribusi berharga bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi kesimpulan berikut perlu dipertimbangkan; 1) pariwisata berbasis masyarakat, dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ideal. 2) CBT adalah bentuk pariwisata yang mungkin layak dalam hal permintaan pasar dan/atau sumber daya fisik yang tersedia bagi masyarakat setempat. Yang diperlukan untuk meningkatkan bentuk-bentuk pariwisata ini adalah kesadaran akan perlunya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pengembangannya (Moscardo, 2008). Prinsip-prinsip inti keberlanjutan juga tersirat dalam TALC / siklus perkembangan pariwisata (mengambil pandangan jangka panjang, menjaga pembangunan dalam batasan lingkungan dan sosial, penekanan pada komunitas, penjagaan lingkungan, dan perlunya regulasi dan tanggung jawab), meskipun unsur-unsur ekuitas antar dan intra-generasi, fitur utama pembangunan berkelanjutan, tidak dibahas atau tersirat dalam TALC.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengkaji kondisi yang menjadikan kelurahan Canden layak untuk mengembangkan destinasi pariwisata kebugaran. Selain itu juga mengeksplorasi hubungan antara TALC dan CBT dengan mengusulkan model yang menggambarkan tahapan TALC dalam kaitannya dengan CBT..” Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Canden dan proses pengembangan destinasi wisata yang dinamis merupakan fenomena yang cukup menarik dan relevan untuk dikaji.



LANDASAN TEORI

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diterima secara luas, namun masih belum ada konsensus mengenai makna sebenarnya dari istilah ini. Artinya, bisa memiliki makna yang berbeda pada orang yang berbeda dan dapat diterapkan pada banyak konteks yang berbeda, termasuk pariwisata. Diantara definisi yang ada, yang paling banyak digunakan yang digunakan dalam Laporan Brundtland yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, Wanhill, 2008). Laporan itu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar keberlanjutan, seperti:

- Mengambil pendekatan holistik terhadap perencanaan dan strategi;
- Memastikan bahwa produktivitas dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
- Memfasilitasi dan melibatkan partisipasi publik;
- Melestarikan proses ekologis yang penting;
- Melindungi lingkungan (keanekaragaman hayati) dan warisan buatan manusia;
- Menyediakan tingkat keadilan dan kesempatan yang lebih baik antara berbagai negara.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bisnis pariwisata relatif jarang diterapkan karena usaha pariwisata dalam perhitungan ekonomi tidak memasukkan biaya sosial dan biaya yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang berfokus pada keterlibatan masyarakat

setempat (Asyifa et al., 2023) dalam perencanaan, pengelolaan, dan manfaat industri pariwisata. Studi terkini tentang topik CBT menyoroti beberapa aspek penting yang menarik perhatian para peneliti dan praktisi di industri pariwisata. Studi ini juga menyajikan hal-hal baru lainnya, termasuk: 1). Menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Ini termasuk perencanaan dan pengelolaan, mendefinisikan tujuan pariwisata, melestarikan warisan budaya, dan berbagi manfaat ekonomi; 2). Lebih banyak penekanan diberikan pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pariwisata. Penelitian baru menyoroti strategi baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan produk pariwisata lokal, dan akses ke pasar yang lebih luas; 3). Ada peningkatan penggunaan teknologi, seperti platform daring dan aplikasi seluler, untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat, pemasaran destinasi, dan pengalaman pariwisata yang lebih interaktif dan kompetitif, dan 4). Menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran

Pariwisata kesehatan dan pariwisata kebugaran merupakan perkembangan dari pariwisata. Pariwisata yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran ini mengalami perkembangan pesat (Smith & Puzko 2009). Sejarah pariwisata kesehatan dan kebugaran berawal dari penggunaan pemandian air panas dan mineral alami untuk tujuan terapeutik di zaman kuno, misalnya, referensi spa paling awal adalah sekitar tahun 1700 SM dengan orang-orang Yunani, Romawi, dan Ottoman meninggalkan warisan pemandian



di seluruh Eropa. Peradaban kuno di Timur Tengah dan Asia juga berkontribusi pada pengembangan etos kesehatan dan kebugaran dalam hal yoga, meditasi, pijat, dan pengobatan herbal.

Definisi pariwisata kesehatan dan kebugaran hampir tidak ada akhirnya, kesehatan, kebugaran, medis, dan spa terkadang digunakan secara bergantian (Smith & Puzko, 2009). Konsep kesehatan dan kebugaran memiliki konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda dan maknanya juga dipengaruhi oleh globalisasi produk kebugaran, yang semakin memperumit standarisasi definisi. Namun, pariwisata kesehatan dan kebugaran dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas dan terkadang tumpang tindih - pariwisata kesehatan dan pariwisata kebugaran. Namun di Eropa, misalnya, pariwisata yang melibatkan penggunaan air mineral dan air panas di kota spa untuk bersantai dan juga perawatan yang ditentukan, termasuk dalam kedua kategori tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan di Finlandia, pariwisata dikaitkan dengan kesehatan ini dibagi menjadi pariwisata medis/perawatan kesehatan dan pariwisata kebugaran (FTB, 2005; 2008; 2014). Motif utama pariwisata medis adalah mengobati penyakit dan menyembuhkan penyakit melalui prosedur medis, sedangkan pariwisata kebugaran, selain menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, berfokus pada aktivitas yang menawarkan kesenangan, kenikmatan, dan perawatan. Perawatan kesehatan kerja/kesejahteraan di tempat kerja, pada gilirannya, dapat masuk ke dalam salah satu kategori tergantung pada tujuannya, rehabilitasi atau pencegahan.

Definisi pariwisata kesehatan dan kebugaran seringkali disamakan, kesehatan, kebugaran, medis, dan spa terkadang digunakan secara bergantian (Smith & Puzko, 2009). Konsep kesehatan dan kebugaran

memiliki konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda dan maknanya juga dipengaruhi oleh globalisasi produk kebugaran, yang semakin memperumit standarisasi definisi. Pariwisata kesehatan dan kebugaran dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas dan terkadang saling tumpang tindih antara pariwisata kesehatan dan pariwisata kebugaran. Di Eropa, misalnya, pariwisata yang melibatkan penggunaan air mineral dan air panas di kota spa untuk bersantai dan juga perawatan yang ditentukan, termasuk dalam kedua kategori tersebut.

Pariwisata medis dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. “Ketika seseorang bepergian ke luar lingkungan tempat tinggalnya yang biasa, untuk mencari layanan medis, itu disebut “pariwisata medis”, dan pada saat kedatangan, orang tersebut disebut “wisatawan medis”, dan kegiatan tersebut yang mencakup pemanfaatan layanan medis, baik secara langsung maupun tidak langsung – keramahtamahan, paparan budaya atau pariwisata alam”. Dengan demikian aspek rekreasi dari perjalanan juga termasuk dalam perjalanan wisata medis. Secara umum, pariwisata medis dianggap sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang di luar tempat tinggalnya yang biasa untuk menerima perawatan medis, investigasi atau terapi dan wisatawan memanfaatkan infrastruktur, atraksi dan fasilitas yang ada di destinasi.

Goodrich & Goodrich (1991) mendefinisikan pariwisata medis, khususnya dalam hal perawatan kesehatan sebagai upaya pihak fasilitas wisata (misalnya hotel) atau destinasi untuk menarik wisatawan dengan menawarkan layanan dan fasilitas perawatan kesehatannya, selain fasilitas pariwisata regulernya. Pasar pariwisata medis telah menjadi ceruk pariwisata kesehatan yang berbeda (Connell 2006) didominasi sejumlah negara Asia, misalnya Thailand dan India. Beberapa negara telah mencoba memasuki



bidang ini, misalnya Kanada (Supapol & Barrows, 2007) Makau (Lam et al. 2011). Arellano (2011) menjelaskan bahwa di beberapa negara, pariwisata medis dipandang sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan/atau diversifikasi produk pariwisata. Misalnya, di Karibia, Kuba memiliki produk pariwisata kesehatan yang sudah lama ada dan berkembang dengan baik dan kini sejumlah negara lain memasuki pasar kesehatan dan kebugaran yang lebih luas, masing-masing dengan fokus yang berbeda pada produk dan layanannya; Puerto Riko (medis), Jamaika (kebugaran), dan Barbados (infertilitas). Masalah yang terus muncul di lokasi-lokasi ini dan lainnya dalam mendorong pariwisata kesehatan dan medis adalah bahwa penduduk setempat harus terlebih dahulu memiliki akses yang memadai dan hal ini tidak boleh dikompromikan oleh inisiatif pariwisata kesehatan apa pun. Sementara pariwisata kesehatan dapat mencakup komponen medis atau perawatan, pariwisata kebugaran umum dianggap memiliki fokus yang lebih holistik pada kesejahteraan individu fisik, emosional, dan spiritual dan tidak mencakup perawatan medis. Keserasian pariwisata mencakup kawasan pariwisata spa yang sedang berkembang sehingga banyak negara berupaya untuk mencitrakan diri mereka sebagai destinasi spa (Joppe, 2010). Fasilitas klub kesehatan dan spa, yang dulunya terbatas pada resor yang terletak di sekitar mata air mineral alami, kini menjadi bagian yang diterima dari pengembangan hotel dan resor baru. Pilihan untuk menggabungkan konsep kesehatan/spa berkisar dari menyediakan kolam renang dan sauna hingga pusat kebugaran lengkap dengan staf pelatihan, hingga resor spa yang menyediakan layanan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan eksklusif.

Pariwisata kebugaran adalah bagian dari pariwisata kesejahteraan. Namun,

pariwisata kebugaran melampaui kesejahteraan karena pariwisata ini terkait erat dengan kualitas tinggi dan kemewahan. Kebugaran dipahami sebagai gaya hidup penemuan diri yang diperoleh melalui tanggung jawab diri, proaktif, dan pengambilan keputusan secara sadar. Hal ini juga lebih terkait dengan kesejahteraan material, produk dan layanan konkret, dan komersialitas. Lebih jauh, Kebugaran mencerminkan konsumsi hedonistik dalam hal, misalnya pengalaman, kualitas tinggi, memanjakan diri, dan kesenangan dan, oleh karena itu, dipandang sebagai kenikmatan yang lebih pasif melalui, misalnya perawatan spa dan kecantikan. Dewan Pariwisata Finlandia (2005), mendefinisikan kebugaran adalah mencakup kualitas tinggi yang berkaitan dengan tempat, suasana, pengaturan, layanan, produk, dan staf profesional. Kesejahteraan merangsang semua indra dalam lingkungan yang estetik. Produk kesejahteraan adalah entitas yang direncanakan, disegmentasikan, dipasarkan, dan diimplementasikan dengan baik, yang juga mencakup sentuhan kemewahan.

Setiap bagian dari pariwisata kesehatan dan kebugaran memiliki masalah perkembangannya sendiri. Misalnya, masalah khusus yang terkait dengan bidang pariwisata medis meliputi privatisasi perawatan kesehatan, akses yang tidak merata ke perawatan kesehatan, dan globalisasi layanan perawatan kesehatan yang semakin cepat (Connell 2006). Dalam kasus wisata spa, masalah perkembangan meliputi pemasaran, perawatan, dan daya saing. Pariwisata yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran diidentifikasi sebagai sektor pariwisata kontemporer yang berkembang pesat (Smith & Puzko 2009).

Smith et al. (2010) menjelaskan bahwa isu utama dalam pengembangan pariwisata yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran adalah segmentasi pasar, standar



dan pengembangan produk serta pencitraan destinasi (Pasar dapat disegmentasi berdasarkan minat dan tujuan, produk, serta biaya. Dalam kasus wisata medis, pasar dapat disegmentasikan berdasarkan tujuan, kompleksitas perawatan, jenis perawatan, dan biaya. Setiap bagian dari wisata kesehatan dan kebugaran memiliki masalah perkembangannya sendiri. Misalnya, masalah khusus yang terkait dengan bidang wisata medis meliputi privatisasi perawatan kesehatan, akses yang tidak merata ke perawatan kesehatan, dan globalisasi layanan perawatan kesehatan yang semakin cepat (Connell, 2006). Dalam kasus wisata spa, masalah perkembangan meliputi pemasaran, perawatan, dan daya saing

Pariwisata dan Partisipasi Masyarakat

Dijelaskan oleh Nagarjuna (2015), bahwa pariwisata dapat memberikan dampak positif dan negatif pada masyarakat setempat, sehingga pariwisata dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Bagi sebagian masyarakat, pariwisata dapat menjadi penggerak pembangunan secara keseluruhan, dan bagi sebagian lainnya dapat menimbulkan dampak negative dan tidak mendapatkan manfaatnya. Keterlibatan masyarakat setempat menjadi hal mendasar untuk meningkatkan manfaat pariwisata, dan meminimalkan dampak negatif dari pariwisata. Manajemen partisipatif dipandang sebagai elemen penting untuk menghindari dampak negatif pariwisata bagi masyarakat lokal dan ekosistem (Burgos & Mertens, 2017). Salleh dkk. (2016) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal, yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari pembangunan pariwisata di sekitar lingkungan mereka, merupakan hal yang paling penting. Keterlibatan masyarakat dalam pariwisata merupakan landasan yang diperlukan untuk perubahan dan pembangunan (Rasoolimanesh & Jaafar, 2016). Partisipasi masyarakat sebaiknya

diposisikan sebagai unsur penting dalam meningkatkan kualitas kontribusi pariwisata terhadap pembangunan nasional (Novelli dan Gebhardt, 2007). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti pembangunan melibatkan kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan, Dengan demikian, CBT mencakup pengembangan masyarakat di daerah terpencil, pedesaan, miskin, terpinggirkan, tertekan secara ekonomi, terbelakang, adat, etnis minoritas, dan masyarakat di kota-kota kecil (Tasci, Semrad & Yilmaz, 2013). Pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan holistik dalam memberdayakan kelompok kurang mampu secara berkelanjutan (Tasci, Semrad & Yilmaz, 2013). Dengan demikian, isu-isu di luar masalah ekonomi juga harus dipertimbangkan seperti pengembangan masyarakat. mencakup masalah keadilan sosial, pemberdayaan, dan kemandirian dan sebagainya (Saayman & Giampiccoli, 2016).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pariwisata ada berbagai cara (Tosun, 2006). Dijelaskannya, setiap tingkat [partisipasi masyarakat] memungkinkan adanya tingkat keterlibatan eksternal dan kontrol lokal yang berbeda, dan mencerminkan hubungan kekuasaan di antara keduanya. Dengan berdasar pada penelitian yang dirujuknya, Tosun (2006) mengusulkan tiga tingkat partisipasi pariwisata sebagaimana terlihat pada Tabel 1

Tabel 1. Tipologi Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata

Partisipasi spontan	Partisipasi yang diinduksi	Partisipasi koersif
Bottom-up; partisipasi aktif; partisipasi langsung; partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi autentik; perencanaan mandiri	Top-down; pasif; formal; sebagian besar tidak langsung; tingkat tokenisme; beberapa manipulasi; partisipasi semu; partisipasi dalam implementasi dan pembagian manfaat; pilihan antara alternatif yang diusulkan dan umpan	Top-down; pasif; sebagian besar tidak langsung; formal; partisipasi dalam implementasi, tetapi tidak selalu berbagi manfaat; pilihan antara alternatif terbatas yang diusulkan atau tidak ada pilihan; paternalisme; non-partisipasi; tingkat



	balik	tokenisme dan manipulasi yang tinggi
--	-------	--------------------------------------

Sumber: (Tosun, 2006).

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat (UNO, 1992). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memperkenalkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pembangunan, Selain itu juga mengembangkan rencana untuk partisipasi aktor baru, strategi untuk melibatkan perusahaan sipil dalam proses pembangunan, dan mendukung argumen keberlanjutan. Partisipasi masyarakat lokal merupakan prasyarat agar manfaat dapat menjangkau masyarakat, lapangan kerja lokal dan manfaat lainnya yang seringkali mengorbankan inisiatif dan kendali lokal (Li, 2006). Misalnya, di destinasi; di satu sisi partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata tidak hanya menjamin kesejahteraan 'masyarakat' melalui penciptaan lapangan kerja, memberikan manfaat sosial ekonomi dan membantu dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga mencakup isu keberlanjutan lingkungan, budaya dan etika di destinasi. Karena itu, hal ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk berinteraksi melalui hubungan pasar atau rantai pasokan wisata dengan arus informasi. Dengan demikian; mereka mengembangkan sinergi di antara mereka untuk menghasilkan nilai tambah bagi wisatawan melalui inisiatif & partisipasi masyarakat. CBT merupakan bentuk pariwisata yang memiliki tiga aspek dasar penting, yaitu (a) keterlibatan masyarakat; (b) akses ekonomi yang sama, dan (c) pemberdayaan politik untuk mendukung masyarakat sebagai pengambil keputusan” (Djou, Baiquni, Widodo, & Fandeli, 2017). Partisipasi dalam CBT dapat

dilihat sebagai hal yang mendasar. CBT digambarkan sebagai jenis pariwisata yang mempromosikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, pengembangan, pengelolaan, dan kepemilikan. Masyarakat merupakan aktor utama dan fokus CBT “karena mereka dapat berperan sebagai penyerap tenaga kerja (Briones, Yusay, & Valdez, 2017). Selain itu, perlu dicatat bahwa masyarakat perlu diajak konsultasi dalam semua aspek karena mereka akan menjadi garda terdepan yang akan secara langsung menerima dampaknya”. Amerta (2017) menjelaskan bahwa CBT memiliki karakteristik berikut:

1. Bentuk tata kelola pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengendalikan dan terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
2. Bentuk tata kelola pariwisata yang dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam bisnis pariwisata untuk juga mendapatkan manfaat dari pariwisata yang ada.
3. Bentuk pariwisata ini menuntut pemberdayaan yang sistematis dan distribusi manfaat yang demokratis dan adil kepada masyarakat yang kurang beruntung di destinasi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan CBT perlu memperhatikan tiga prinsip dasar berikut:

1. Melibatkan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan,
2. Kepastian manfaat bagi masyarakat setempat dari kegiatan pariwisata, dan
3. Pendidikan pariwisata bagi masyarakat setempat” (Amerta, 2017).

CBT dapat didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang menyediakan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengendalikan dan terlibat dalam



pengelolaan dan pengembangan pariwisata. CBT melibatkan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan (Amerta, 2017). Pengambilan keputusan dalam CBT harus sepenuhnya berada di tangan anggota masyarakat, yang berarti mereka tidak dapat terlibat di dalamnya karena mereka mengendalikan, memiliki, dan mengelola proses pengambilan keputusan secara apriori.

Di banyak daerah, CBT dikembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat lokal tidak diberi akses ke sumber daya lokal yang merupakan hak mereka. Selain itu, masyarakat lokal ditawarkan pekerjaan yang tidak terlalu penting seperti kebersihan, keamanan, dan jenis pekerjaan serupa, sementara pekerjaan yang penting ditawarkan kepada masyarakat perkotaan dan dalam banyak kasus juga kepada orang luar. Pengembang berbicara tentang “mengintegrasikan masyarakat ke dalam pariwisata,” tetapi mereka jarang mengunjungi masyarakat dan menanyakan apa yang diinginkan penduduk setempat. Sebaliknya, operasi diberlakukan dengan cara yang terlalu umum (Naik, 2014:45).

Siklus Perkembangan Kawasan Pariwisata (TALC)

Dijelaskan oleh Butler (1980), bahwa siklus hidup kawasan pariwisata terdiri dari enam tahap:

- 1) *Tahap eksplorasi*,. Dalam tahap eksplorasi tidak akan ada fasilitas khusus yang disediakan bagi pengunjung. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas lokal dan kontak dengan penduduk lokal kemungkinan besar akan tinggi.
- 2) *Tahap keterlibatan*, Pada tahap ini jumlah pengunjung meningkat dan menjadi teratur, jumlah penduduk lokal yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan wisatawan misalnya makanan meningkat. Beberapa penduduk lokal mulai menyediakan fasilitas terutama atau bahkan khusus untuk pengunjung.
- 3) *Tahap pengembangan*, destinasi mulai dipromosikan oleh media, dan seiring dengan berjalannya tahap ini, keterlibatan dan kendali lokal terhadap pengembangan akan menurun dengan cepat. Beberapa fasilitas yang disediakan secara lokal akan menghilang, digantikan oleh fasilitas yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih mutakhir yang disediakan oleh organisasi eksternal, khususnya untuk akomodasi pengunjung.
- 4) *Tahap konsolidasi*, jaringan utama dalam industri pariwisata akan terwakili tetapi hanya sedikit, jika ada, penambahan yang akan dilakukan,
- 5) *Tahap stagnasi*, “pengembangan baru akan bersifat perifer terhadap area wisata asli dan properti yang ada kemungkinan akan mengalami perubahan kepemilikan yang sering.
- 6) *Tahap penurunan*, keterlibatan lokal dalam pariwisata kemungkinan akan meningkat pada tahap ini, karena karyawan dan penduduk lainnya mampu membeli fasilitas dengan harga yang jauh lebih rendah saat pasar menurun,” tetapi mungkin menjadi daerah kompetisi antar anggota masyarakat, sehingga bisa menjadikan apresiasi masyarakat terhadap manfaat pariwisata bagi mereka menurun
- 7) *Tahap peremajaan*, ini dapat terjadi melalui pembangunan objek wisata baru atau eksploitasi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian mixed method, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam



mengumpulkan, menganalisis dan memadukan hasil kajiannya (Johnson dan Onwuegbuzie, dalam Damanik dkk, 2012). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pemahaman dan pengalaman individu dalam pengembangan pariwisata kebugaran lebih mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan pernyataan Rubin & Babbie (2016) yang menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari pengalaman manusia tertentu dan menghasilkan data kualitatif: pengamatan yang secara teoritis lebih kaya yang tidak mudah dikuantifikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari tokoh masyarakat, pengusaha dan pejabat yang ada di Canden melalui wawancara secara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para pengelola usaha dan tokoh masyarakat pejabat kalurahan Canden dan jurnalis. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan dan program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Bantul dan kalurahan Canden. Penelitian ini melibatkan 20 informan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan tentang pengembangan pariwisata di kalurahan Canden, Kecamatan Jetis, kabupaten Bantul. Informan tersebut meliputi pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul, pejabat Kecamatan Jetis, pejabat pemerintah Kalurahan Canden, tokoh masyarakat Canden, dan warga di wilayah kalurahan Canden. Lokasi penelitian adalah wilayah kalurahan Canden karena Canden merupakan lokasi pengembangan destinasi wisata yang potensinya cukup besar. Analisis data mengikuti pendekatan Miles, (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Pengembangan Destinasi Wisata Kebugaran Canden

Posisi Strategis Canden

Canden berada pada posisi yang strategis, ini ditunjukkan oleh: 1) berada di dekat objek wisata lain di Yogyakarta, antara lain: Makam Imogiri, Pantai Parang Tritis. Dua objek wisata tersebut sangat terkenal di Yogyakarta. Jarak dari Imogiri sekitar 3 Km. Jarak dari parangtritis sekitar 5 Km. Untuk mencapai Canden dari Imogiri dan Parang Tritis dapat ditempuh dalam waktu 10 menit karena kondisi jalan yang menuju canden sudah sangat baik; 2) berada dalam sekitar jalur lintas selatan Yogyakarta yang menghubungkan Gunung kidul, Bantul dan Kulon Progo; 3) dekat dengan kota Yogyakarta, jarak dari Yogyakarta sekitar 7 Km; 4) akses untuk menuju dan keluar dari destinasi ini sangat mudah karena tersedia jalan yang kondisinya baik untuk menuju kota.

Potensi Dan Daya Tarik Destinasi Wisata Kebugaran Canden

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan mata pencaharian selama sepuluh tahun terakhir, di mana banyak penduduk Canden, beralih dari bertani ke perdagangan skala kecil, terutama jamu dan makanan tradisional yang potensia untuk mendukung pengembangan pariwisata .Meskipun pergeseran ini telah meningkatkan pendapatan harian dibandingkan dengan mata pencaharian tradisional, hal ini menggarisbawahi kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan, memperkuat argumen untuk inisiatif pengembangan pariwisata lebih lanjut. Masyarakat memandang pariwisata sebagai katalis ekonomi potensial dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengelola objek wisata lokal. Mereka menekankan manajemen inklusif, yang menghormati kepentingan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai dan budaya lokal. Masyarakat setuju Canden



mengembangkan destinasi pariwisata kebugaran sesuai potensi yang dimilikinya untuk mendukung / berdampak positif pada ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang unik, jamu, makanan, kesenian tradisional, dan aktivitas sehari-hari mereka, warga bercita-cita untuk berkontribusi pada pariwisata secara aktif.

Pariwisata kebugaran di Canden dikembangkan dengan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang melingkupinya. Faktor internal berupa berbagai potensi yang ada di Canden, yang menjadi, meliputi alam yang unik dan menarik dan seni dan budaya yang masih dilestarikan masyarakat. Potensi utama yang ada adalah: 1) perusahaan jamu; 2) perusahaan makanan tradisional; 3) perusahaan barang kerajinan; 4) kelompok seniman; 5) kelompok tani; 6) kelompok pemelihara hewan. Kondisi alam yang berpotensi mendukung adalah: 1) lanskap wilayah Canden yang terdiri dari dataran yang luas untuk lahan pertanian dan kebun; 2) sungai opak yang mengalir melewati wilayah Canden. Faktor eksternal adalah: 1) kebijakan pemerintah Indonesia yang menjadi pendorong pengembangan pariwisata kesehatan dan kebugaran; 2) meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tersedianya wahana untuk menjaga kesehatan dan kebugaran; 3) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rekreasi / berpariwisata untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupannya; 4) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berwisata;

Tujuan dari pengembangan destinasi wisata adalah menjadikan Canden sebagai tempat yang dapat dikunjungi orang untuk berwisata kebugaran, yakni berpariwisata dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran. Jadi dalam hal ini penekanannya adalah orang mencari kesenangan dan mendapatkan kebugaran, ini dapat disebut berekreasi yang bertujuan. Fenomena seperti itu bisa disebut

sebagai *Purposive leisure.*, yakni istilah yang digunakan untuk membedakan dengan rekreasi yang bermanfaat secara pribadi bagi pelaku rekreasi. (Wardiyanta, 2017)

Peran Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kebugaran

Pengembangan pariwisata di Kalurahan Canden merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan Canden secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat sangat besar perannya dalam pengembangan pariwisata, yang bertujuan untuk mengubah masyarakat dari sekadar penonton menjadi peserta aktif (Muchammad Satrio Wibowo & Belia, 2023). Temuan lapangan menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme pejabat pemerintah Kalurahan Canden dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Pariwisata direncanakan menjadi penggerak ekonomi yang penting disamping pengembangan usaha, pertaian dan seni. Cakupan lapangan kerja di sektor pariwisata di Canden mencakup peran langsung seperti pekerja di sektor pendukung seperti pengolahan makanan dan kerajinan tangan. Industri kuliner, khususnya, telah tumbuh, didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat (Widya Setiyanti & Sadono, 2015).

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata menggunakan konsep pembangunan dari bawah (bottom-up) yaitu diawali dengan adanya pemahaman tentang potensi pariwisata kebugaran yang ada di kalurahan Canden. Selanjutnya tumbuhnya motivasi dan adanya partisipasi masyarakat local pengembangan pariwisata Canden dan para pemangku kepentingan lain di Canden menyadari bahwa untuk mempersiapkan pariwisata diperlukan antara lain: memperluas kesempatan belajar, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, dan



meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai agen perubahan (Mardikanto and Soebianto, 2019). Sehingga memungkinkan ruang yang lebih luas dan setara bagi masyarakat untuk memberi aspirasi tentang desa wisata kebugaran yang diinginkan masyarakat dan berdasarkan analisis kebutuhan.

Tahapan pengembangan diawali dengan FGD pada tanggal 30 Juli 2022 yang melibatkan pejabat kalurahan Canden, para pengelola usaha, pengurus pokdarwis Poleng jaya serta akademisi dari UAD. Dari FGD itu dihasilkan pemetaan permasalahan dan pengumpulan aspirasi dari pimpinan atau perangkat kalurahan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata kebugaran. FGD berikutnya dilaksanakan pada 5 Agustus 2022. Dengan FGD itu terbangun hubungan interaktif yakni para stakeholder membangun kepercayaan, saling menghormati serta saling terbuka satu sama lain. Partisipasi masyarakat meningkat dalam mempersiapkan potensi Canden untuk mendukung pengembangan destinasi wisata kebugaran. Selain itu juga dihasilkan kesepakatan pemanfaatan desain tata ruang destinasi wisata kebugaran yang disumbangkan oleh pihak perguruan tinggi, yakni dari universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selanjutnya dari situ proses pengembangan destinasi wisata kebugaran mulai, diikuti dengan berbagai peningkatan keberdayaan dari pengusaha jamu, pengusaha kuliner, perajin, dan pekerja seni dalam mendukung terujutnya destinasi wisata kebugaran.

Tantangan dalam Mengelola Destinasi Pariwisata Kebugaran

Dalam mengelola Canden sebagai destinasi pariwisata kebugaran, ada beberapa tantangan yang dapat menjadi hambatan, yang harus dilewati, diantaranya: 1) pemerintah perlu memposisikan pariwisata sebagai sektor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pariwisata masih dalam tahap awal

perkembangan, dapat dipahami jika sumbangan ekonominya masih sangat kecil sehingga kepercayaan pemerintah bahwa sektor ini dapat memberi sumbangan ekonomi juga masih cukup terbatas. Pariwisata pun belum diposisikan penting. Paradigma bahwa pertanian yang terpenting perlu memperhatikan hal ini. Pergeseran paradigma ini penting jika pariwisata dianggap sebagai sektor strategis yang melibatkan masyarakat (Palimbunga, 2017). Sentimen ini perlu digaungkan oleh pemerintah daerah, yang menekankan urgensi rekayasa sosial dalam membangun kapasitas masyarakat bersama para pemangku kepentingan pariwisata. 2) tantangan berikutnya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pentingnya potensi alam, sosial dan budaya yang ada di Canden yang berpotensi mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebugaran. Analisis konteks sosial-budaya, kondisi lingkungan, dan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk mengidentifikasi potensi dan ancaman yang terkait dengan pariwisata (Sugiarti et al., 2016). Analisis tersebut akan menjadi dasar pengembangan model pariwisata yang menguntungkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengembangan destinasi pariwisata kebugaran di Canden yang masih dalam tahap awal, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor geografi, demografi dan sosial sangat berperan dalam hal ini. Lokasi yang strategis, banyaknya penduduk dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya destinasi pariwisata kebugaran sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat Canden menjadi faktor yang mendorong pengembangan destinasi pariwisata di



.....

Canden. Berbagai kelemahan yang ada pada yang memungkinkan menjadi hambatan antara lain adalah masih terbatasnya masyarakat yang sudah memahami Canden sebagai destinasi pariwisata kebugaran dan masih terbatasnya keyakinan pemerintah terhadap kemampuan pariwisata dalam memberi sumbangan ekonomi pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amerta, I. M. S. (2017). Community based tourism development. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3): 97-107.
- [2] Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam. *Jurnal Penelitian Pilar*, 14(1), 15–31.
- [3] Briones, Z. B. H., Yusay, R. M. S., & Valdez, S. (2017). Enhancing community based tourism programs of Gawad Kalinga Enchanted Farm towards sustainable tourism development. *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing*, 9(1): 51-60.
- [4] Andrés Burgos & Frédéric Mertens, 2017. “Participatory management of Community-Based Tourism: A Network Perspective” *Community Development Journals*, vol. 48(4), pages 546-565
- [5] Connell, J. (2006) Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and Surgery. *Tourism Management*, 27, 1093-1100
- [6] Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism Principles and Practice* (4th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- [7] Dwi Widya Setiyanti dan Dwi Sadono, (2015) Dampak Pariwisata Terhadap Peluang Usaha Dan Kerja Luar Pertanian Di Daerah Pesisir, dalam *Solidarity Journal Sosiologi Pedesaan*, 5 (3), hlm. 259-272.
- [8] Gadi Joe, Baiquni, M. Widodo, T dan Fandeli, Chafid (2017). Symbolic Partisipation in community based tourism in Kelimutu National Park, Ende, East Nusa Tenggara, *Journal of Business and management*, 1(19): 5 – 20.
- [9] Goodrich, T.J (1991) Women, Power, and Family Therapy: What’sWrong With This Picture ? *Journal of Feminist Family Therapy*, 3(1-2), 5-37. https://doi.org/10.1300/1086v03n01_02
- [10] Joppe Marion (2010), One Country’s Transformation to Spa Destination: The Case of Canada, *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 17, 117–126. DOI 10.1375/jhtm.17.1.117
- [11] Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Public*. Bandung : ALFABETA
- [12] Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Source book*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [13] Mitchell, R. E., & Eagles, P. F. J. (2001). An Integrative Approach to Tourism: Lessons from the Andes of Peru. *Journal of Sustainable Tourism*, 9(1): 4-28.
- [14] Moscardo, G. (2008). Building community capacity for tourism development: conclusion. In: Moscardo, G. ed. *Building community capacity for tourism development*. Wallingford: CAB International, 172-179.
- [15] Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2013). Interrogating the role of the state and nonstate actors in community-based tourism ventures: toward a model for



- spreading the benefits to the wider community. *South African Geographical Journal*, 95(1): 1-15.
- [16] Muchammad Satrio Wibowo & Belia (2023), *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*, <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>
- [17] Nagarjuna, G. (2015). Local community involvement in tourism: a content analysis of websites of wildlife resorts. *Atna. Journal of Tourism Studies*, 10(1): 13-21.
- [18] Naik, S. (2014). *Community based tourism approach – a review*. *Compass*, 1(2): 42-47.
- [19] Novelli, M., & Gebhardt, K. (2007). Community based tourism in Namibia: “reality show” or “window dressing”. *Current Issues in Tourism*, 10(5): 443-479.
- [20] Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa*, 01(02), 15–32.
- [21] Rasoolimanesh, S. M., & Jaafar, M. (2016). Community participation toward tourism development and conservation program in rural world heritage sites. In Butowski, L. ed. *Tourism – from Empirical Research towards Practical Application*. London: InTech, 1-14.
- [22] Saayman, M., & Giampiccoli, A. (2016). Community-based and pro-poor tourism: initial assessment of their relation to community development. *European Journal of Tourism Research*, 12: 145-190.
- [23] Salleh, N. H. M., Shukor, M. S., Othman, R., Samsudin, M., & Idris, S. H. M. (2016). Factors of local community participation in tourism related business: case of Langkawi Island. *International Journal of Social Science and Humanity*, 6(8): 565-571.
- [24] Smith, A.L. and Cashwell, C.S. (2010) Stigma and Mental Illness: Investigating Attitudes of Mental Health and Non-Mental-Health Professionals and Trainees. *The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, 49, 189-202. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1939.2010.tb00097.x>
- [25] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).
- [26] Sugiarti, Hartati, T., & Amir, H. (2016). *Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Padma Ardya Aktuaria Jakarta*. *Epigram*, 13(1), 13–20
- [27] Tasci, A. D. S., Semrad, K. J., & Yilmaz, S. S. (2013). Community based tourism finding the equilibrium in COMCEC context: *Setting the Pathway for the Future*. Ankara: COMCEC Coordination Offi 1359278.
- [28] Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27: 493-504.
- [29] Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6): 613-633.
- [30] Tosun, C., Timothy, D. J., & Öztürk, Y. (2003). Tourism growth, national development and regional inequality in



-
- Turkey. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(2-3): 133-161.
- [31] Wardiyanta (2017), *Rekreasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, *Disertasi*, Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada